



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
"JAYA KERTI"**

Kantor Pusat : Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No. 16, Mengwi, Badung
Telp. (0361) 810106, 813016, Fax. 830154, WA: 0877 5059 1344
Email : bprjayakerti@yahoo.com
Website : www.bprjayakerti.co.id

Kantor Kas : Jl. Raya Padang Luwih, Dalung, Kuta, Badung, Telp. (0361) 439344, Fax. 439345
: Pertokoan Kuta Mulia Blok 5 Jl. Majapahit No.18 Kuta, Telp. (0361) 752286

Mengwi, 28 April 2026

No : 154/BJK/MGW/IV/2026

Lamp : 1 (satu) gabung

Kepada Yth.

Dewan Pengurus Pusat

Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia dan Media BPR

KOMP. PARTA II No. 46

Jl Jend. Ahmad Yani-By Pass Cempaka Putih

Jakarta Pusat 10510

di -

JAKARTA

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Jaya Kerti Tahun 2025

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka dengan ini dapat kami sampaikan Laporan tersebut Posisi 31 Desember 2025 sebagai berikut :

1. Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT BPR Jaya Kerti.
2. Surat Pengantar Laporan Tata Kelola BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bukti Tanda Terima Laporan Tata Kelola dari Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian kami sampaikan atas petunjuk serta pembinaanya kami ucapkan terima kasih.

PT BPR JAYA KERTI




I Wayan Sunarta, SE., Ak
Direktur

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR JAYA KERTI
TAHUN 2025**



**Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16
Mengwi Badung
TELEPON: (0361) 810106, 813016**



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR Jaya Kerti
Alamat	Jl Raya Mengwitani-Jurusan Denpasar-Tabanan No 16 Mengwi Badung
Nomor Telepon	(0361) 810106

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT BPR Jaya Kerti pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang belum stabil baik akibat pandemi maupun isu perang dunia.

PT BPR Jaya Kerti memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT BPR Jaya Kerti dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kabupaten Badung. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT BPR Jaya Kerti didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT BPR Jaya Kerti.

PT BPR Jaya Kerti telah beroperasi lebih dari 35 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, PT BPR Jaya Kerti selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, PT BPR Jaya Kerti terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik
--------------------------------------------------------------------------	----------------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal



terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Ni Wayan Sriasih
	Jabatan	Direktur Utama
	NIK	5103064511720007
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:		
a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku		
b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank		
c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.		
d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.		
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.		
f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.		
2.	Nama	I Wayan Sunarta
	Jabatan	Direktur Operasional dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	NIK	5102082907670001
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut:		
a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan		
b. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang		
c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain		
d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar tidak menyimpang dari ketentuan		
e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain		
f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.		

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:



- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR Jaya Kerti.
- d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti
- f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	I Ketut Gede Suwena
	Jabatan	Komisaris Utama
	NIK	5171020405650001
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:		
a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		
b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank		
c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan		
d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.		
2.	Nama	I Dewa Gede Ngurah
	Jabatan	Komisaris
	NIK	5171022712610002
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:		
a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		
b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank		
c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan		
d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa		



Keuangan) dan Instansi lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward/ apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR Jaya Kerti.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2025.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Modal inti BPR masih di bawah Rp. 80 Miliar, sehingga BPR belum membentuk komite.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Modal inti BPR masih di bawah Rp. 80 Miliar, sehingga BPR belum membentuk komite.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Ni Wayan Sriasih
	NIK	5103064511720007
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
2.	Nama	I Wayan Sunarta
	NIK	5102082907670001
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Ketut Gede Suwena
	NIK	5171020405650001
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Dewa Gede Ngurah
	NIK	5171022712610002
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Salah satu Anggota Direksi BPR Jaya Kerti yaitu Direktur Utama memiliki saham pada BPR sebesar 20%.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Ni Wayan Sriasih
	NIK	5103064511720007
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	I Wayan Sunarta
	NIK	5102082907670001
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	I Ketut Gede Suwena
	NIK	5171020405650001
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	I Dewa Gede Ngurah
	NIK	5171022712610002
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham tidak memiliki Saham pada Kelompok Usaha BPR.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Ni Wayan Sriasih
	NIK	5103064511720007
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR Picu Manunggal Sejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
2.	Nama	Ni Wayan Sriasih
	NIK	5103064511720007
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR Mambal
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Salah satu Anggota Direksi BPR Jaya Kerti yaitu Direktur Utama memiliki Saham pada Bank (BPR) lain yaitu di PT BPR Picu Manunggal Sejahtera dan PT BPR Mambal masing-masing 20%.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Ni Wayan Sriasih
----	------	------------------



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

	NIK	5103064511720007
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Wayan Sunarta
	NIK	5102082907670001
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Ketut Gede Suwena
	NIK	5171020405650001
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Dewa Gede Ngurah
	NIK	5171022712610002
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tidak memiliki Hubungan Keuangan satu dengan yang lain.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Ni Wayan Sriasih
	NIK	5103064511720007
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Putu Budisastra-Adik Ni Nyoman Soka-Ibu
2.	Nama	I Wayan Sunarta
	NIK	5102082907670001
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Ketut Gede Suwena
	NIK	5171020405650001
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Dewa Gede Ngurah



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

NIK	5171022712610002
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Ada salah satu Anggota Direksi PT BPR Jaya Kerti yang memiliki Hubungan Keluarga dengan Pemegang Saham yaitu Ni Wayan Sriasih.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp336.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp220.800.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp381.302.940
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp156.036.210

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan	Rp267.100.000



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

Tantiem Direksi (Rp)	
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp141.440.000

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0
-----------------------------------------	-----

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
----------------------------------------------	---------

Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
------------------------------------------	-----

Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
------------------------------------------------	---------

Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0
--------------------------------------------	-----

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
----------------------------------------------------	---------

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
------------------------------------------------	-----

Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
------------------------------------------------------	---------

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0
--------------------------------------------------	-----

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
--------------------------------------------------------	---------

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
----------------------------------------------------	-----

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
----------------------------------------------------------	---------

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0
------------------------------------------------------	-----

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS.



12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	4,87 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,04 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,03 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,91 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,01 : 1
-------------	----------

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah tersebut dihitung berdasarkan gaji dan tunjangan yang dikeluarkan tahun 2025.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	29 April 2025
----	---------------	---------------

	Jumlah Peserta	7 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

a. Rencana Bisnis BPR

- Rencana Penghimpunan Dana
- Rencana Penyaluran Dana
- Rencana dan upaya memperbaiki Kinerja Bank
- Upaya mengatasi kekurangan Modal
- Rencana Perluasan Jaringan Kantor

b. Isu-Isu Strategis BPR

- Turunnya Suku Bunga KUR
- Pencapaian penghimpunan dana dalam triwulan I
- Pencapaian penyaluran dana pada triwulan I
- Mulai menurunnya produktifitas usaha debitur sehingga berdampak pada NPL

c. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis

- Pencapaian penghimpunan dana baik tabungan harian maupun tabungan sidarti



belum tercapai masih terdapat kekurangan 13,10 % di bawah dari yang direncanakan begitu pula dengan deposito berjangka belum tercapai masih terdapat kekurangan 0,14% di bawah dari yang direncanakan

- Penyaluran kredit belum tercapai masih 5,08 % di bawah target yang direncanakan pada triwulan I
- d. Evaluasi/penetapan kebijakan Strategis
- Kebijakan suku bunga Dana dan Kredit
- Peningkatan pengetahuan SDM melalui pendidikan-pendidikan

2.	Tanggal Rapat	11 Juli 2025
----	---------------	--------------

	Jumlah Peserta	7 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

a. Rencana Bisnis BPR

- Rencana Penghimpunan Dana
- Rencana Penyaluran Dana
- Rencana dan upaya memperbaiki Kinerja Bank
- Upaya mengatasi kekurangan Modal
- Rencana Perluasan Jaringan Kantor

b. Isu-Isu Strategis BPR

- Turunnya Suku Bunga KUR
- Pencapaian penghimpunan dana dalam triwulan II
- Pencapaian penyaluran dana pada triwulan II
- Mulai menurunnya produktifitas usaha debitur sehingga berdampak pada NPL

c. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis

- Pencapaian penghimpunan dana baik tabungan harian maupun tabungan sidarti belum tercapai masih terdapat kekurangan 9,07 % di bawah dari yang direncanakan sedangkan deposito berjangka dapat tercapai 1,94 % di atas yang direncanakan
- Penyaluran kredit tercapai sebesar 0,31 % di atas target yang ditetapkan pada triwulan II

d. Evaluasi/penetapan kebijakan Strategis

- Kebijakan suku bunga Dana dan Kredit
- Peningkatan pengetahuan SDM melalui pendidikan-pendidikan

3.	Tanggal Rapat	10 Oktober 2025
----	---------------	-----------------

	Jumlah Peserta	7 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

a. Rencana Bisnis BPR

- Rencana Penghimpunan Dana
- Rencana Penyaluran Dana
- Rencana dan upaya memperbaiki Kinerja Bank
- Upaya mengatasi kekurangan Modal
- Rencana Perluasan Jaringan Kantor

b. Isu-Isu Strategis BPR

- Turunnya Suku Bunga KUR
- Pencapaian penghimpunan dana dalam triwulan III
- Pencapaian penyaluran dana pada triwulan III



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

- Mulai menurunnya produktifitas usaha debitur sehingga berdampak pada NPL
- c. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis
- Pencapaian penghimpunan dana baik tabungan harian maupun tabungan sidarti belum tercapai masih terdapat kekurangan 1,91 % di bawah dari yang direncanakan sedangkan deposito berjangka dapat tercapai 3,12 % di atas yang direncanakan
- Penyaluran kredit tercapai sebesar 2,07 % di atas target yang ditetapkan pada triwulan III
- d. Evaluasi/penetapan kebijakan Strategis
- Kebijakan suku bunga Dana dan Kredit
- Peningkatan pengetahuan SDM melalui pendidikan-pendidikan
- Pembahasan hasil pemeriksaan OJK

4.	Tanggal Rapat	15 Januari 2026
	Jumlah Peserta	7 orang

Topik/Materi Pembahasan:

- a. Rencana Bisnis BPR
 - Rencana Penghimpunan Dana
 - Rencana Penyaluran Dana
 - Rencana dan upaya memperbaiki Kinerja Bank
 - Upaya mengatasi kekurangan Modal
 - Rencana Perluasan Jaringan Kantor
- b. Isu-Isu Strategis BPR
 - Turunnya Suku Bunga KUR
 - Pencapaian penghimpunan dana dalam triwulan IV
 - Pencapaian penyaluran dana pada triwulan IV
 - Mulai menurunnya produktifitas usaha debitur sehingga berdampak pada NPL
- c. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis
 - Pencapaian penghimpunan dana baik tabungan harian maupun tabungan sidarti belum tercapai masih terdapat kekurangan 10,37 % di bawah dari yang direncanakan begitu pula dengan deposito berjangka belum tercapai masih terdapat kekurangan 0,13% di bawah dari yang direncanakan
 - Penyaluran kredit tercapai sebesar 4,02 % di atas target yang ditetapkan pada triwulan IV
- d. Evaluasi/penetapan kebijakan Strategis
 - Kebijakan suku bunga Dana dan Kredit
 - Peningkatan pengetahuan SDM melalui pendidikan-pendidikan

Dalam 1 tahun Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 4 kali.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I Ketut Gede Suwena
	NIK	5171020405650001
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I Dewa Gede Ngurah
	NIK	5171022712610002
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Dewan komisaris hadir setiap ada rapat yang dilakukan karena kedua anggota dewan komisaris berdomisili di provinsi yang sama.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada	0 kasus



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

Tahun Laporan	
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada	0 kasus



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

Tahun Laporan	
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Tidak terdapat penyimpangan internal (internal fraud) yang dialami BPR Jaya Kerti sepanjang tahun 2025.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
------------------------------------------------------------------------------------------	---------

1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
-----------------------------------------------------------	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
----------------------------------------------------------	---------

Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi BPR Jaya Kerti sepanjang tahun 2025.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada BPR Jaya Kerti sepanjang Tahun 2025.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

1.	Tanggal Pelaksanaan	12 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DPD Perbarindo Bali
	Penjelasan Kegiatan	Aksi Sosial Peduli Bencana.
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	18 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Dharma Jati Bali
	Penjelasan Kegiatan	Melakukan Kunjungan untuk memberikan Bantuan berupa Sumbangan Dana dalam rangka Ulang Tahun PT BPR Jaya Kerti Ke 35 Tahun.
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	16 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DPD Perbarindo
	Penjelasan Kegiatan	Donasi Bencana Alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000

Pada tahun 2025 PT BPR Jaya Kerti melakukan dan turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, antara lain memberikan sumbangan (donasi) untuk korban bencana dan melakukan kunjungan untuk memberikan bantuan dalam rangka HUT PT BPR Jaya Kerti yang ke 35 Tahun.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR JAYA KERTI untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badung, 21 April 2026

PT BPR JAYA KERTI

Ni Wayan Sriasih, SE. MM
Direktur Utama



I Ketut Gede Suwena
Komisaris Utama

**SELF ASSESSMENT
PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR JAYA KERTI
TAHUN 2025**



**PT BPR JAYA KERTI
MENGWI-BADUNG**



KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER II TAHUN 2025

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Teloh Terpenuhi	<i>BPR Jaya Kerti memiliki komposisi dan persyaratan pemegang saham yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Teloh Terpenuhi	<i>Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS pada BPR Jaya Kerti telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Pada BPR Jaya Kerti, Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sudah diterapkan dengan cukup baik.</i>
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris telah diterapkan dengan cukup baik di BPR Jaya Kerti.</i>
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Cukup Baik	<i>BPR Jaya Kerti mendapat dukungan yang cukup baik dari pemegang saham, dalam upaya pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.</i>
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi BPR Jaya Kerti dinilai cukup baik, dalam hal memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.</i>
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Cukup Baik	<i>Pada BPR Jaya Kerti, setiap pengambilan keputusan dilakukan melalui RUPS dengan memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Cukup Baik	<i>Pemegang saham BPR Jaya Kerti memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.</i>
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Cukup Baik	<i>Perkembangan kinerja BPR Jaya Kerti tercapai dengan cukup baik sejalan dengan rencana strategis, yang antara lain terlihat melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.</i>
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Pemegang saham BPR Jaya Kerti tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak mengambil keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris secara sepihak.</i>
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Cukup Baik	<i>Penggunaan laba dan pembagian dividen pada BPR Jaya Kerti telah memperhatikan dengan baik kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)



Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. BPR Jaya Kerti memiliki komposisi dan persyaratan pemegang saham yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS pada BPR Jaya Kerti telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Pada BPR Jaya Kerti, Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris sudah diterapkan dengan cukup baik.2. Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris telah diterapkan dengan cukup baik di BPR Jaya Kerti.3. BPR Jaya Kerti mendapat dukungan yang cukup baik dari pemegang saham, dalam upaya pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.4. Ditinjau dari sisi regulasi BPR Jaya Kerti dinilai cukup baik, dalam hal memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.5. Pada BPR Jaya Kerti, setiap pengambilan keputusan dilakukan melalui RUPS dengan memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Pemegang saham BPR Jaya Kerti memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

	<ol style="list-style-type: none">2. Perkembangan kinerja BPR Jaya Kerti tercapai dengan cukup baik sejalan dengan rencana strategis, yang antara lain terlihat melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.3. Pemegang saham BPR Jaya Kerti tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak mengambil keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara sepihak.4. Penggunaan laba dan pembagian dividen pada BPR Jaya Kerti telah memperhatikan dengan baik kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Sebagian Terpenuhi	Jumlah anggota Direksi belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tetapi telah terdapat salah satu anggota Direksi yang bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Untuk pemenuhan jumlah anggota Direksi akan dioptimalkan pada saat proses konsolidasi selesai.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi BPR Jaya Kerti bertempat tinggal di wilayah yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Anggota Direksi BPR Jaya Kerti tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi BPR Jaya Kerti telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi BPR Jaya Kerti telah memastikan terpenuhinya sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi BPR Jaya Kerti telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Telah Terpenuhi	Direksi BPR Jaya Kerti telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Direksi BPR Jaya Kerti tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Telah Terpenuhi	Direksi BPR Jaya Kerti telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Baik	Direksi BPR Jaya Kerti telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Cukup Baik	Direksi BPR Jaya Kerti telah melaksanakan dengan baik penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	Cukup Baik	Direksi BPR Jaya Kerti telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Direksi BPR Jaya Kerti telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Cukup Baik	Pada BPR Jaya Kerti, Pengambilan Keputusan Direksi dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Cukup Baik	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.



16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Cukup Baik	<i>Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</i>
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Cukup Baik	<i>Anggota Direksi BPR Jaya Kerti telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</i>
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Cukup Baik	<i>Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.</i>
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	Cukup Baik	<i>Direksi BPR Jaya Kerti telah mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR dengan cukup baik.</i>
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Cukup Baik	<i>Anggota Direksi BPR Jaya Kerti mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</i>
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Cukup Baik	<i>Direksi BPR Jaya Kerti telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.</i>
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Cukup Baik	<i>Direksi BPR Jaya Kerti telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dengan cukup baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Cukup Baik	<i>Direksi BPR Jaya Kerti telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.</i>



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Cukup Baik	Seluruh pegawai BPR Jaya Kerti telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Cukup Baik	Keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Cukup Baik	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Cukup Baik	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Cukup Baik	Direksi BPR Jaya Kerti telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	8 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	18 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)



Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
Nilai Faktor	
Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik.</p> <p>c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh anggota Direksi BPR Jaya Kerti bertempat tinggal di wilayah yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2. Anggota Direksi BPR Jaya Kerti tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.3. Seluruh anggota Direksi BPR Jaya Kerti telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.4. Direksi BPR Jaya Kerti telah memastikan terpenuhinya sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.5. Direksi BPR Jaya Kerti telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah anggota Direksi belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tetapi telah terdapat salah satu anggota Direksi yang bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Untuk pemenuhan jumlah anggota Direksi akan dioptimalkan pada saat proses konsolidasi selesai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Direksi BPR Jaya Kerti telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.2. Direksi BPR Jaya Kerti telah melaksanakan dengan baik penerapan prinsip tata kelola,



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

	<p>manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Direksi BPR Jaya Kerti telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.4. Direksi BPR Jaya Kerti telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.5. Pada BPR Jaya Kerti, Pengambilan Keputusan Direksi dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Direksi BPR Jaya Kerti telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.2. Seluruh pegawai BPR Jaya Kerti telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.3. Keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.4. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.5. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pemenuhan jumlah anggota Dewan Komisaris akan dioptimalkan pada saat proses konsolidasi selesai.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Anggota Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti bertempat tinggal di wilayah yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Anggota Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Telah Terpenuhi	Seluruh Komisaris Independen BPR Jaya Kerti tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Telah Terpenuhi	Anggota Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.



8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Baik	Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Cukup Baik	Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Cukup Baik	Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Cukup Baik	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Cukup Baik	Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Cukup Baik	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.



15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Cukup Baik	<i>Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.</i>
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.</i>
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Cukup Baik	<i>Anggota Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</i>
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</i>
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</i>
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Dewan Komisaris telah memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.</i>
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti secara berkala telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Cukup Baik	<i>Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.</i>



23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.</i>
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Cukup Baik	<i>Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.</i>
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Cukup Baik	<i>Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</i>
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Cukup Baik	<i>Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		7 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		17 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 3 (Cukup Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>d. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Anggota Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti bertempat tinggal di wilayah yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2. Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.3. Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.4. Anggota Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.5. Seluruh Komisaris Independen BPR Jaya Kerti tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pemenuhan jumlah anggota Dewan Komisaris akan dioptimalkan pada saat proses konsolidasi selesai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.2. Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.3. Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

	<p>fungsi pengawasan.</p> <p>4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.</p> <p>5. Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>2. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>3. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.</p> <p>4. Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>5. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	<i>BPR belum memiliki komite Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pemenuhan pembentukan Komite tersebut akan dioptimalkan pada saat proses konsolidasi selesai.</i>
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	<i>BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite tetapi belum disempurnakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Penyempurnaan pedoman dan tata tertib tersebut akan dioptimalkan pada saat proses konsolidasi selesai.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Cukup Baik	<i>Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik antara lain dalam pelaksanaan manajemen risiko dengan memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.</i>
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Cukup Baik	<i>Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap Penerapan Fungsi Audit Intern.</i>
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Cukup Baik	<i>Pejabat Eksekutif Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko.</i>
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Bagian remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</i>
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Cukup Baik	<i>Bagian yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.</i>



8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Cukup Baik	<i>Masing- masing bagian mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Cukup Baik	<i>Pejabat Eksekutif memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.</i>
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Pejabat Eksekutif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.</i>
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Cukup Baik	<i>Hasil rapat setiap bagian dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh karyawan sebagai bahan evaluasi.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		9 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 3 (Cukup Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor positif atau nihil.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none">1. BRP belum memiliki komite Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pemenuhan pembentukan Komite tersebut akan dioptimalkan pada saat proses konsolidasi selesai.2. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite tetapi belum disempurnakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Penyempurnaan pedoman dan tata tertib tersebut akan dioptimalkan pada saat proses konsolidasi selesai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik antara lain dalam pelaksanaan manajemen risiko dengan memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.2. Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap Penerapan Fungsi Audit Intern.3. Pejabat Eksekutif Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko.4. Bagian remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.5. Bagian yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Eksekutif memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.2. Pejabat Eksekutif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

	intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. 3. Hasil rapat setiap bagian dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh karyawan sebagai bahan evaluasi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	BPR Jaya Kerti telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Cukup Baik	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Cukup Baik	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Jaya Kerti menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Cukup Baik	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah didokumentasikan dengan baik.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Cukup Baik	Implementasi indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:			Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:			0 Indikator



Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup cukup memadai, serta penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan. b. Terdapat benturan kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara cukup baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR Jaya Kerti telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Jaya Kerti menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

	<p>kepentingan.</p> <p>2. Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah didokumentasikan dengan baik.</p> <p>3. Implementasi indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR Jaya Kerti telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Cukup Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Cukup Baik	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dengan baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Cukup Baik	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Cukup Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.



Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
Nilai Faktor	
Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2. BPR Jaya Kerti telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai



	<p>permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.</p> <p>4. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.</p> <p>2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dengan baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</p> <p>2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR Jaya Kerti telah memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada posisi Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Cukup Baik	BPR Jaya Kerti telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Cukup Baik	BPR Jaya Kerti telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja Pejabat Eksekutif audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.



8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Cukup Baik	<i>Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.</i>
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Cukup Baik	<i>BPR Jaya Kerti telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.</i>

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	<i>BPR Jaya Kerti telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Cukup Baik	<i>BPR Jaya Kerti telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	6 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)



Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. BPR Jaya Kerti telah memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.3. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.5. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada posisi Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. BPR Jaya Kerti telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.2. BPR Jaya Kerti telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja Pejabat Eksekutif audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.3. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.4. BPR Jaya Kerti telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. BPR Jaya Kerti telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.2. BPR Jaya Kerti telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Cukup Baik	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR Jaya Kerti telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Cukup Baik	BPR Jaya Kerti telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Cukup Baik	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	Cakupan hasil audit telah mencantumkan paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	



Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, sehingga hasil audit menggambarkan sebagian permasalahan BPR.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR Jaya Kerti telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit). 2. BPR Jaya Kerti telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.2. Cakupan hasil audit telah mencantumkan paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah Terpenuhi	BPR Jaya Kerti telah memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	BPR Jaya Kerti telah memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Cukup Baik	Direksi BPR Jaya Kerti telah : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Cukup Baik	Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Cukup Baik	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko dengan cukup baik.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Cukup Baik	BPR Jaya Kerti telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	BPR Jaya Kerti telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	BPR Jaya Kerti telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan cukup baik.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Cukup Baik	BPR Jaya Kerti telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	BPR Jaya Kerti telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan cukup baik.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Cukup Baik	BPR Jaya Kerti telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.



14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Cukup Baik	<i>Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Cukup Baik	<i>BPR Jaya Kerti telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.</i>
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	<i>BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan cukup baik.</i>
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Cukup Baik	<i>BPR Jaya Kerti telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		14 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 3 (Cukup Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
Nilai Faktor	
Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga: 1) peringkat risiko sedang; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.</p> <p>b. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup cukup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Sebagian pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<p>1. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. BPR Jaya Kerti telah memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.</p> <p>3. BPR Jaya Kerti telah memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Direksi BPR Jaya Kerti telah : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p> <p>3. Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi</p>



	<p>anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p> <ol style="list-style-type: none">4. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko dengan cukup baik.5. BPR Jaya Kerti telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.6. BPR Jaya Kerti telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.7. BPR Jaya Kerti telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan cukup baik.8. BPR Jaya Kerti telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.9. BPR Jaya Kerti telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan cukup baik.10. BPR Jaya Kerti telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.11. Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. BPR Jaya Kerti telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.2. BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan cukup baik.3. BPR Jaya Kerti telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	<i>BPR Jaya Kerti telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	Cukup Baik	<i>BPR Jaya Kerti secara berkala telah mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.</i>
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Cukup Baik	<i>Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	<i>Laporan pemberian kredit oleh BPR Jaya Kerti kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	<i>BPR Jaya Kerti tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		0 Indikator	



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki dan mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup cukup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi sebagian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelanggaran BMPK dilakukan dengan baik.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR Jaya Kerti telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR Jaya Kerti secara berkala telah mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan pemberian kredit oleh BPR Jaya Kerti kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2. BPR Jaya Kerti tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Teloh Terpenuhi	BPR Jaya Kerti telah memiliki ketersediaan sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Teloh Terpenuhi	BPR Jaya Kerti telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Teloh Terpenuhi	BPR Jaya Kerti telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Cukup Baik	BPR Jaya Kerti telah memperhatikan dengan baik prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	BPR Jaya Kerti telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	BPR Jaya Kerti telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	<i>BPR Jaya Kerti telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	<i>BPR Jaya Kerti telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Cukup Baik	<i>Seluruh laporan yang disampaikan oleh BPR Jaya Kerti telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.</i>

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Cukup Baik	<i>Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.</i>
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	<i>Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Cukup Baik	<i>Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil



Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, walaupun tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR Jaya Kerti telah memiliki ketersediaan sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 2. BPR Jaya Kerti telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris. 3. BPR Jaya Kerti telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. BPR Jaya Kerti telah memperhatikan dengan baik prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.2. BPR Jaya Kerti telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.3. BPR Jaya Kerti telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.4. BPR Jaya Kerti telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.5. BPR Jaya Kerti telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.3. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR Jaya Kerti termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Cukup Baik	Rencana bisnis BPR Jaya Kerti disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Cukup Baik	Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah melaksanakan pengawasan dengan baik terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Cukup Baik	Kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			3 Indikator



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR	
Nilai Faktor	
Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur hanya dilakukan sebagian.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Rencana bisnis BPR Jaya Kerti termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana bisnis BPR Jaya Kerti disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.2. Dewan Komisaris BPR Jaya Kerti telah melaksanakan pengawasan dengan baik terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2. Kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR JAYA KERTI mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 3 (Cukup Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 3 (Cukup Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 3 (Cukup Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 3 (Cukup Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 3 (Cukup Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 3 (Cukup Memadai)
Peringkat Komposit		3
Predikat Komposit		Cukup Baik

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan tetapi tetap memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
Faktor Positif
<ol style="list-style-type: none">1. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.2. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.3. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.4. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.5. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern dinilai terpenuhi secara keseluruhan.6. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.7. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.8. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.9. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.10. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham berjalan dengan memadai.11. Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi memadai.12. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung



Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian memadai.

13. Proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite dinilai memadai.
14. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan pencapaian memadai.
15. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan penilaian memadai.
16. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan penilaian memadai.
17. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR dinilai memadai.
18. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan pencapaian memadai.
19. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR tergolong memadai.
20. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR berada dalam kondisi memadai.
21. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR berjalan dengan memadai.
22. Implementasi hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondisi memadai.
23. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian memadai.
24. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian memadai.
25. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR berada dalam kondisi memadai.
26. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR dinilai memadai.
27. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
28. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR saat ini dinilai memadai.
29. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dinilai memadai.
30. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dinilai memadai.
31. Hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai.
32. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR dinilai memadai.
33. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan penilaian memadai.

Faktor Negatif

1. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai masih terpenuhi sebagian.
2. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.
3. Dari sisi struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER II TAHUN 2025

Nama BPR : PT BPR JAYA KERTI
Alamat : Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung
Nomor Telepon : (0361) 810106, 813016
Posisi Laporan : Semester II Tahun 2025
Modal Inti : Rp52.903.267.496
Total Aset : Rp207.932.931.959

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 3 (Cukup Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 3 (Cukup Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 3 (Cukup Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 3 (Cukup Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 3 (Cukup Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 3 (Cukup Memadai)
Peringkat Komposit		3
Predikat Komposit		Cukup Baik



Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan tetapi tetap memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

Faktor Positif

1. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
2. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
3. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
4. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
5. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
6. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
7. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
8. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
9. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
10. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham berjalan dengan memadai.
11. Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi memadai.
12. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian memadai.
13. Proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite dinilai memadai.
14. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan pencapaian memadai.
15. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan penilaian memadai.
16. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan penilaian memadai.
17. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR dinilai memadai.
18. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan pencapaian memadai.
19. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR tergolong memadai.
20. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR berada dalam kondisi memadai.
21. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR berjalan dengan memadai.
22. Implementasi hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondisi memadai.
23. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian memadai.
24. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian memadai.
25. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR berada dalam kondisi memadai.
26. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR dinilai memadai.



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

27. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
28. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR saat ini dinilai memadai.
29. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dinilai memadai.
30. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dinilai memadai.
31. Hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai.
32. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR dinilai memadai.
33. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan penilaian memadai.

Faktor Negatif

1. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai masih terpenuhi sebagian.
2. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.
3. Dari sisi struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.

Badung, 29 Januari 2026

PT BPR JAYA KERTI

Ni Wayan Sriasih, SE. MM
Direktur Utama



I Ketut Gede Swena
Komisaris Utama



PT BPR JAYA KERTI

Jl. Raya Mengwitani - Jurusan Denpasar - Tabanan No.16 Mengwi Badung

Telepon: (0361) 810106, 813016

Website: www.bprjayakerti.co.id, Email: bprjayakerti@yahoo.com

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR JAYA KERTI Semester II Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR JAYA KERTI selama semester II tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Badung, 29 Januari 2026

PT BPR JAYA KERTI

Ni Wayan Sriasih, SE. MM
Direktur Utama



I Ketut Gede Swena
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Jaya Kerti

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1034626-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-601052-30012026125523

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

ekaadnyani27@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-30 12:55:23



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Jaya Kerti

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039680-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-601052-27042026121507

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

ekaadnyani27@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-27 12:15:07



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.